

## PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL PARIWISATA KABUPATEN TAKALAR DALAM Mendukung PARIWISATA BERKELANJUTAN

Nuvida Raf<sup>1</sup>, Ridwan Syam<sup>2</sup>, Atma Ras<sup>3</sup>, Arini Enar Lestari AR<sup>4</sup>, Sultan<sup>5</sup>, Suryanto Arifin<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email Korespondensi: [ridwansyam@unhas.ac.id](mailto:ridwansyam@unhas.ac.id)

### Abstract

*Sustainable tourism can be achieved through strengthening the social institution of tourism where stakeholders ranging from village officials to community members synergize with each other. This strategic step in strengthening the institution is carried out by providing training, skills and synergistic collaboration so that Topejawa tourist beach in Takalar Regency becomes a sustainable tourist area and can improve community welfare. This community service activity involves a social institutional component in Topejawa Village. Evaluation and strengthening of understanding of the roles of government officials, PKK mobilization groups, Pokdarwis, youth groups, Tourism Ambassadors, and the private sector occurred during interactive discussions after the lecture method was carried out. Increasing the role and function of village institutions is encouraged to become sustainable tourism and bring the community to common prosperity.*

**Keywords:** Sustainable tourism; Social institutions; Community empowerment; Capacity strengthening

### Abstrak

Pariwisata berkelanjutan dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan sosial pariwisata di mana para pihak berkepentingan mulai dari aparat desa hingga anggota masyarakat saling bersinergi. Langkah strategis dalam penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan pemberian pelatihan, keterampilan dan kolaborasi yang sinergis sehingga Pantai wisata Topejawa di Kabupaten Takalar menjadi daerah wisata yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan komponen kelembagaan sosial di Desa Topejawa. Evvaluasi dan penguatan pemahaman akan peran-perannya aparat pemerintah, kelompok penggerak PKK, Pokdarwis, kelompok pemuda, Duta Wisata, dan swasta terjadi saat diskusi interaktif setelah metode ceramah dilakukan. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan desa didorong guna menjadi pariwisata tetap berkelanjutan dan membawa masyarakat pada kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** Pariwisata berkelanjutan; Kelembagaan sosial; Pemberdayaan masyarakat; Penguatan kapasitas.

Submitted: 2024-11-03

Revised: 2024-11-20

Accepted: 2024-12-13

### Pendahuluan

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang dijelaskan dalam buku "Takalar Dalam Angka 2021" diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Hal ini memberikan gambaran, kepariwisataan di Kabupaten Takalar terus dikembangkan karena potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah yang dekat dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Takalar terus mengembangkan potensi pariwisatanya (Ruslan, 2013). Di kabupaten ini mencakup berbagai destinasi yang meliputi keindahan alam dan keberagaman budaya lokal. Takalar selama ini dikenal dengan wisata pantainya dan menawarkan kuliner laut. Sementara di sisi budaya lokal, Takalar terkenal dengan tradisi *Maudu Lompoa* di Desa Cikoang (Alam & Irsan, 2024). Mengingat hal ini semua, pembangunan pariwisata tentunya harus terus berkelanjutan.

Keberlanjutan pariwisata menunjukkan adanya proses pengelolaan potensi pariwisata yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan pada aspek sosial dan budaya masyarakat lokal (Arasy et al., 2019). Tujuan dari pariwisata berkelanjutan ini tidak lain adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, masyarakat lokal, dan

pelestarian lingkungan. Pada konsep ini interaksi sosial yang harmonis diantara semua pihak pemangku kepentingan dipertahankan, kemudian kepastian keadilan dari manfaat pariwisata yang bisa dirasakan oleh semua pihak serta tetap terjaganya kearifan lokal dan keseimbangan ekosistem.

Akan tetapi, untuk mencapai keberlanjutan, pengelolaan pariwisata memerlukan penguatan kelembagaan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat lokal, melestarikan budaya, serta memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya Pemerintah Kabupaten Takalar dalam keberlanjutan pariwisata diwujudkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Takalar 2020-2035 yang telah menjadi landasan sinergitas para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif.

Kebijakan ini tentunya harus didukung oleh masyarakat setempat di mana akan melibatkan lembaga-lembaga sosial yang ada. Secara sosiologis lembaga-lembaga sosial melingkupi organisasi masyarakat dan perilaku yang diharapkan dapat mendukung program pariwisata berkelanjutan. Di sini organisasi dan perilaku dapat dibangun, diajarkan, dipelihara dan dipertahankan secara bersama-sama.

Penguatan kelembagaan sosial memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kelembagaan sosial, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata di daerahnya (Nugroho et al., 2016). Melalui kelembagaan sosial, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, mengembangkan kapasitas, dan membangun kemitraan dengan pemerintah serta pelaku usaha pariwisata untuk menciptakan iklim pariwisata yang kondusif (Muganda et al., 2013).

Penguatan kelembagaan sosial juga dapat mendorong terwujudnya pariwisata yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal. Kelembagaan sosial berperan dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti melalui penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan peningkatan pendapatan (Sutawa, 2012). Selain itu, kelembagaan sosial juga dapat menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian, promosi, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata secara bertanggung jawab (Putra & Pitana, 2010).

Dalam konteks Kabupaten Takalar, penguatan kelembagaan sosial diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan pariwisata. Melalui kelembagaan sosial yang kuat, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan objek wisata, menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan, serta mempromosikan potensi pariwisata daerah (Junaid, 2016). Kolaborasi antara kelembagaan sosial, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan atraksi wisata yang unik dan berdaya saing (Haryanto, 2019). Dengan demikian, penguatan kelembagaan sosial merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pariwisata Kabupaten Takalar yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tope Jawa Kabupaten Takalar ini merupakan kerjasama antara Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin dengan Dina Pariwisata Kabupaten Takalar, dan mengundang beberapa pihak terkait seperti Aparatur Pemerintah Desa, Babinsa, Duta Wisata, Ibu PKK, dan anggota masyarakat seperti bapak-bapak dan para ibu yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Penyampaian materi dalam bentuk ceramah secara interaktif dilakukan dan dilanjutkan dengan diskusi. Secara bertahap, penyampaian materi tentang penguatan kelembagaan desa bertujuan untuk menyamakan persepsi pihak-pihak yang bekerja sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa

TopeJawa. Penguraian peran masing-masing pihak dan apa saja yang telah dilakukan selama ini menjadi bagian sebagai *sharing* praktek selama ini. Sehingga diskusi lebih difokuskan pada aspek yang bisa ditingkatkan guna lebih mendukung program pariwisata yang bisa mensejahterakan masyarakat setempat dan sekitarnya. Diskusi melibatkan para Duta Wisata Kabupaten Takalar yang memiliki tugas mempromosikan wisata khususnya pantai di Desa Topejawa. Pada bagian diskusi ini juga para peserta mencoba mengevaluasi perilaku sosial yang dipandang dapat mendukung program pariwisata yang berkelanjutan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah et al., (2021) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata merupakan kunci keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Dewi, 2013). Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, serta merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di destinasi wisata (Purnamasari, 2011). Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan pariwisata (Nurhidayati, 2015). Hal ini sesuai dengan pernyataan Sidiq & Resnawaty (2017) bahwa penguatan kelembagaan sosial memerlukan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim pariwisata yang kondusif dan berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Peserta Kegiatan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Departemen Sosiologi Fisip Unhas di Desa Topejawa, Kabupaten Takalar adalah mereka yang telah terlibat dan mendukung Program Pariwisata selama ini, khususnya wisata bahari dan kuliner di sekitar Pantai TopeJawa. Kegiatan yang berlangsung 1 (satu) hari dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah Desa dalam kegiatan ini adalah para pegawai atau staf dalam pemerintahan desa. Para aparatur ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Aparatur pada umumnya bekerja untuk mendukung kepala desa dalam tugas-tugas seperti mengelola urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Secara struktur aparatur pemerintahan di desa meliputi: pertama, Kepala Desa yang menjadi pemimpin pemerintahan desa. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan desa, dan seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa. Kedua adalah perangkat desa yang merujuk pada berbagai pejabat dan staf yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti Sekretaris Desa yang bertanggung jawab atas administrasi umum di desa, termasuk dokumentasi dan keuangan; Kepala Urusan (Kaur) yang terdiri dari beberapa bidang, seperti urusan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, keuangan, dan pembangunan. Kemudian perangkat desa berikutnya adalah Kepala Seksi (Kasi) yang bekerja pada berbagai bagian sesuai dengan tugas spesifik, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan. Kepala dusun merupakan apatur desa yang memiliki tanggung jawab atas dusun yakni bagian dari desa. Kepala dusun juga bekerja untuk memastikan informasi dari kepala desa sampai kepada warga dusun. Adapun aparatur desa berikutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD ini merupakan satu lembaga yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kebijakan yang diambil oleh kepala desa. BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dan dapat memberikan saran atau masukan kepada kepala desa.

Para Aparatur desa ini, dalam konteks pariwisata bekerja secara bersama-sama dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan pariwisata, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban dan ketentraman di desa. Oleh karena itu, kehadiran para aparatur desa pada kegiatan ini menjadi penting, selain sebagai mitra juga sebagai sumber informasi utama yang memperkaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kelompok Ibu Penggerak PKK

Kelompok Ibu penggerak PKK adalah para ibu yang telah bergabung dalam organisasi PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Para ibu ini menjadi penggerak yang aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Kegiatan PKK pada umumnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan kesehatan, ekonomi keluarga, lingkungan, dan sosial. Sebagai kelompok penggerak, para ibu ini sering kali menjadi ujung tombak dalam program-program pembangunan berbasis keluarga di tingkat desa atau kelurahan.

3. Duta Wisata

Duta Wisata pada umumnya dipilih dalam suatu ajang perlombaan yang diadakan Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten. Pada kegiatan ini, 3 orang Duta Pariwisata terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan adalah pemenang dari Lomba Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Takalar pada tahun lalu. Mereka ini berstatus pelajar dan mahasiswi. Adapun peran para Duta Wisata ini adalah mewakili dan mempromosikan pariwisata daerah Takalar. Mewakili generasi muda, para Duta Wisata memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya, sejarah, dan potensi wisata daerah Takalar, mereka juga harus memiliki kemampuan dalam mempromosikan keunikan destinasi wisata di Takalar kepada wisatawan. Duta Wisata sangat berkepentingan dalam kegiatan ini karena berperan penting dalam program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan menjaga lingkungan.

4. Ibu rumah tangga

Para ibu rumah tangga di sini merujuk pada ibu yang ikut terlibat dalam kegiatan pariwisata mulai dari kuliner. Para ibu ini menjadi bagian dari kelompok Sadar Wisata di desa.

5. Bapak-bapak

Bapak-bapak dalam konteks pengabdian ini merujuk kepada kelompok pria dewasa yang umumnya berperan sebagai kepala keluarga atau anggota masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Mereka sering kali dilibatkan dalam kegiatan pengabdian seperti pembangunan infrastruktur, gotong royong, serta kegiatan lain yang memerlukan partisipasi dan keterampilan untuk mendukung pembangunan desa.

## B. Tahap Penyajian Materi

Penyajian materi dilakukan setelah Kepala Desa sebagai aparatur pemerintahan desa membuka secara resmi kegiatan pengabdian ini. Setelah itu disampaikan materi tentang kelembagaan desa yang mendukung pariwisata. Penyampaian materi juga sekaligus sebagai konfirmasi atas identifikasi peran para pemangku kepentingan pariwisata sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Kelembagaan Desa dan Fungsi/Perannya Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

<b>Aktor</b>	<b>Fungsi/Peran</b>	<b>Komponen Utama Kelembagaan Desa</b>	<b>Peningkatan Kapasitas</b>
Pemerintah Daerah	Pembuat kebijakan, fasilitator	Kebijakan, dukungan finansial, dan	Pelatihan manajemen tata

	pengembangan infrastruktur	infrastruktur	kelola pariwisata dan pengembangan kebijakan berkelanjutan
Masyarakat Lokal	Pemberdayaan keluarga dan masyarakat	Pengembangan SDM, ekonomi lokal, dan partisipasi	Pelatihan keterampilan usaha kecil, pengembangan kapasitas kewirausahaan, dan kesadaran lingkungan
Lembaga Adat dan Budaya	Pelestarian budaya lokal	Pelestarian budaya lokal	Pelatihan dokumentasi budaya dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan acara budaya
Komunitas Penggerak Pariwisata	Promotor dan edukator pariwisata lokal	Pokdarwis dan edukasi masyarakat	Pelatihan pemandu wisata, edukasi pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan atraksi lokal
Akademisi dan Peneliti	Penelitian dan panduan berbasis bukti	Penelitian dan panduan berbasis bukti	Pengembangan metodologi penelitian partisipatif dan pelatihan kolaborasi dengan masyarakat
Sektor Swasta	Pengelola usaha kecil dan kebersihan lingkungan	Investasi dan tanggung jawab sosial (CSR)	Pelatihan CSR berbasis pariwisata berkelanjutan dan investasi di komunitas lokal
Pemberdayaan dan Promosi	Pelaku gotong royong dan pembangunan fisik desa	Platform digital dan promosi pariwisata	Pelatihan pemasaran digital dan penggunaan platform online untuk promosi wisata

Tabel ini menjelaskan peran dan fungsi kelembagaan sosial baik di desa maupun di luar desa, perseorangan maupun entitas dalam mendukung keberlanjutan pariwisata di Desa Topejawa. Secara internal aparat desa seperti kepala desa berperan pada tingkat kebijakan di mana pariwisata di desanya diatur agar bisa berjalan dengan baik. Peraturan desa seperti redistribusi masuk wilayah pantai tertentu diatur besarnya sehingga dirasakan keadilannya oleh para wisatawan dan masyarakat setempat. Para aparat juga menegakkan aturan ini dengan baik. Maka kesinambungan jumlah pendatang yang ingin merasakan pantai atau kuliner tetap terjaga.

Masyarakat lokal dalam hal ini meliputi kelompok ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda menjadi salah satu komponen utama pendukung pariwisata berkelanjutan di mana para ibu apakah yang tergabung dalam kelompok PKK atau Sadar Wisata dapat terlibat dalam pemberdayaan keluarga seperti pembuatan kuliner khas desa atau kerajinan tangan yang bisa dipasarkan pada hari-hari tertentu di saat wisatawan banyak yang datang. Perekonomian desa akan menjadi lebih berjalan dan partisipasi kelompok ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun peningkatan kapasitasnya dapat berupa pelatihan keterampilan usaha kecil, pengembangan kapasitas kewirausahaan, dan kesadaran lingkungan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tujuan pariwisata dikembangkan dan dapat meningkatkan perekonomian lokal serta mendukung keberlanjutan pariwisata. Di sektor pariwisata, UMKM dapat berupa berbagai macam usaha selain kulineran dan kerajinan tangan, seperti penyediaan penginapan dan homestay di mana para wisatawan dapat merasakan pengalaman autentik akan suasana yang lebih personal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.

Untuk para pemuda desa, mereka bisa menjadi pemandu wisata yang dapat membantu wisatawan dalam mengeksplorasi destinasi pariwisata secara lebih mendalam. Para pemandu wisata lokal memainkan peran yang sangat berarti karena dapat mengedukasi mengenai budaya, terkait sejarah, dan nilai-nilai lokal. Para pemuda ini kemudian bisa bergabung dengan para bapak dan ibu rumah tangga dalam kelompok Sadar Wisata. Kelompok ini menjadi wadah bagi anggota masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam mendukung dan mengembangkan potensi pariwisata karena berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Fungsi dari kelompok ini selain mempromosikan pariwisata juga menjadi edukator bagi masyarakat sekitarnya. Karenanya peningkatan kapasitas kelompok ini lebih diarahkan pada keterampilan pemandu wisata, edukasi pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan atraksi lokal. Di sini pula para Duta Wisata bekerja bersama-sama dalam mempromosikan pariwisata lokal. Demikian pula dengan kelompok pemberdayaan dan promosi pariwisata menjadi bagian dari upaya gotong royong dan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan pariwisata. Mereka ini semua dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan pemberian pelatihan platform digital dan promosi pariwisata. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam pemasaran wisata secara digital melalui penggunaan platform online. Para pemuda, duta wisata dan kelompok pemberdayaan pada umumnya adalah generasi yang akrab dengan teknologi digital.

Pada aspek budaya, lembaga adat dan budaya lokal menjalankan fungsinya dalam melestarikan budaya. Nilai-nilai yang dianut dan diagungkan serta budaya dalam bentuk tarian, ritual dan sebagainya harus tetap terjaga. Karenanya pariwisata berkelanjutan berarti budaya lokal terjaga dan tidak tergerus atau tergantikan atas nama pariwisata. Otentifikasi menjadi aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan. Dalam rangka penjagaan ini pelatihan bagi komunitas budaya dapat dilakukan seperti pelatihan dokumentasi budaya dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan acara budaya lokal.

Pihak swasta, dapat menyediakan transportasi lokal untuk wisatawan menikmati daerah wisata seperti menggunakan sepeda motor (ojek) atau mobil sehingga mobilitas wisatawan di



sekitar pantai atau daerah wisata lainnya bisa berjalan dengan baik. Di sini selain memperluas daerah wisata, umkm transportasi bisa mendukung kesejahteraan keluarga.

Satu hal yang menarik dalam kelembagaan sosial pendukung pariwisata berkelanjutan adalah keterlibatan dari pihak pendidikan seperti peneliti dan pendidik dari perguruan tinggi. Pihak ini dapat membantu pihak-pihak sebelumnya dalam mengembangkan pariwisata melalui peran akademisnya seperti penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penelitian misalnya, pihak ini dapat meneliti perkembangan pariwisata sekaligus mengevaluasi pembangunan pariwisata di wilayah tertentu. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan sehingga menjadi lebih baik dan mensejahterakan masyarakat.

### **C. Tahap Diskusi**

Diskusi interaktif dilakukan setelah penyamaan persepsi dilakukan saat penyajian materi. Di tahap ini, identifikasi peran-peran para aktor pariwisata terkonfirmasi dalam arti terjadi dialog yang saling mendukung apa yang telah dilakukan selama ini dalam mendukung pariwisata berkelanjutan khususnya Desa Topejawa.

Para aparatur desa dan kelompok ibu-ibu pada umumnya telah berusia dewasa dan memaknai peran-perannya sebagai kewajiban karena telah merasakan manfaat secara ekonomi dan sosial dari keberadaan pariwisata di daerahnya. Tetapi mereka pun mengakui akan keterbatasannya misalnya dalam mempromosikan wisata daerahnya karena tidak menguasai teknologi digital. Pandangan mereka, promosi di media sosial lebih cocok dilakukan oleh anak muda, generasi digital yang memang lebih menguasai dan familiar dengan media sosial. Mereka pun melihat kelebihan dari media sosial sebagai alat promosi yang andal dibandingkan dengan cara-cara biasa seperti pamflet atau cerita dari satu orang ke yang lainnya.

Para duta wisata menanggapi hal ini dengan antusias dan memperlihatkan bukti promosi mereka di media sosial, mulai dari jumlah followernya yang bertambah dan photo-photo kegiatan wisatawan yang diposting di media sosialnya. Bagi generasi muda ini, memposting kegiatan wisata berarti mereka pun eksis di dunia maya, dan lebih daripada itu mereka pun telah menjalankan tugas dan perannya sebagai Duta Wisata Kabupaten Takalar.

Di sisi yang lain, para ibu dan bapak selain mendengarkan, mereka mengkonfirmasi kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan pelatihan yang pernah didapatkan dari pihak desa yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar. Mereka telah menjadi penggerak yang berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja melalui pembuatan kuliner dan kerajinan yang dilakukan di rumah-rumah. Mereka meminta para Duta Wisata untuk membantu dalam mempromosikan kuliner khas dan kerajinan yang dibuatnya di media sosial.

### **Kesimpulan**

Penguatan kelembagaan sosial desa wisata difokuskan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Topejawa, berlangsung selama satu hari dan berjalan dengan baik. Antusiasme peserta terlihat dalam setiap sesi terutama sesi tanya jawab di mana para pihak terkait saling mendukung dan bersedia membantu untuk lebih terlibat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pada dasarnya peran-peran telah dijalankan dengan baik tapi disadari masih terdapat hal-hal yang harus ditingkatkan lagi. Komponen kelembagaan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing secara berkelanjutan, mekanisme disepakati bersama sehingga saling mendukung satu sama lainnya. Penguatan ini karena mempertimbangkan kelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan menjaga sinergitas antar sektor yang semuanya bertujuan pengelolaan pariwisata yang efektif. Penguatan kelembagaan sosial menjadi langkah strategis

dalam mendukung keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Takalar di mana terbangun kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, pengelolaan pariwisata dapat dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga mempertegas pentingnya pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing.

### Daftar Pustaka

- Anugrah Alam, F., & Maulana Irsan, D. (2024). Strategi Manajemen (POAC) Tradisi Maudu Lompoa Sebagai Event Pariwisata Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1(2). <https://doi.org/10.62180/6wwys963>
- Arasy, M. A., Trisutomo, S., & Ekawati, S. A. (2019). Perencanaan Kawasan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Pantai Gusunga, Kabupaten Takalar). *Jurnal Wilayah & Kota Maritim ...*, 7(6).
- Ruslan, R. (2013). Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Takalar. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.
- Anugrah, F. F., Salahudin, S., & Nurjaman, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal: Sebuah kajian pustaka terstruktur. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(4), 775–789.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Haryanto, J. T. (2019). Kesesuaian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dan Permasalahan Pariwisata di Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 25–36.
- Junaid, I. (2016). Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 59–74.
- Muganda, M., Sirima, A., & Ezra, P. M. (2013). The role of local communities in tourism development: Grassroots perspectives from Tanzania. *Journal of Human Ecology*, 41(1), 53–66.
- Nugroho, I., Pramukanto, F. H., Negara, P. D., Purnomowati, W., & Wulandari, W. (2016). Promoting the rural development through the ecotourism activities in Indonesia. *American Journal of Tourism Management*, 5(1), 9–18.
- Nurhidayati, S. E. (2015). Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(1), 1–10.
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 49–64.
- Putra, I., & Pitana, I. (2010). *Pariwisata pro-rakyat: Meretas jalan mengentaskan kemiskinan di Indonesia*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38–44.
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia Economics and Finance*, 4, 413–422.